

Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada Triwulan I tahun 2024 di Kabupaten Selayar dan Kota Parepare



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7310422/pad-pemkab-selayar-lesu-di-triwulan-i-2024-cuma-rp-8-m-dari-target-rp-95-m>

Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), meraup pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 54 miliar selama triwulan I periode Januari-Maret 2024. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau merupakan perangkat daerah penyumbang pendapatan terbesar. "Target PAD kita di tahun 2024 ini sebesar Rp 203 miliar. Sementara capaian PAD khusus di triwulan 1 tahun ini terealisasi Rp 54 miliar," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare Prasetyo Catur kepada media, Kamis (18/4/2024).

Prasetyo mengungkapkan PAD sebesar Rp 54 miliar di triwulan 1 tersebut merupakan capaian yang sangat positif dan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemkot secara umum hanya menargetkan Rp 48,9 miliar untuk PAD di triwulan 1. "Alhamdulillah capaian Rp 54 miliar tersebut naik 112 persen dari target kita di triwulan 1 yakni Rp 48,9 miliar," terangnya.

Adapun kontribusi terbesar untuk PAD di triwulan 1 ini disumbang oleh RSUD Andi Makkasau Parepare. Nilai PAD dari RSUD Andi Makkasau mencapai Rp 33,075 miliar. Sementara di BKD ditargetkan Rp 13,6 miliar dan capaiannya sebesar Rp 14 miliar. "RSUD Andi Makkasau menjadi kontributor utama dalam pencapaian dengan Rp 33,075 miliar dan melebihi target Rp 25,2 miliar," sebut Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan pihaknya juga melakukan upaya pembenahan untuk bisa meningkatkan capaian PAD antara lain dengan lebih intens dalam mereviu pendapatan dan strategi. Jika sebelumnya hanya dilakukan 3 bulan sekali, maka tahun ini dilakukan setiap bulan. "Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang dilakukan tiga bulan sekali untuk mempertanggungjawabkan capaian realisasi masing-masing PAD dari SKPD. Tahun ini dilakukan setiap bulan, supaya setiap bulan diketahui kendala dan persoalan dan segera mencari solusi atas capaian dan potensi pendapatan yang masih rendah," tuturnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih lesu pada triwulan I 2024 dengan capaian Rp 8,015 miliar dari target Rp 95 miliar. Padahal triwulan I 2023 lalu PAD Selayar mencapai Rp 26 miliar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar mencatat capaian PAD triwulan I periode Januari-Maret 2024 mencapai Rp 8,015 miliar dari target Rp 95 miliar atau 8,44 persen. Sementara, 2023 lalu pada periode yang sama capaian PAD mencapai Rp 26,778 miliar dari target Rp 77,299 miliar atau 34,64 persen. "Terus terang secara makro ekonomi di Kepulauan Selayar masih sangat tergantung dengan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten. Nah, pendapatan (PAD) itu sangat bergantung dari aktivitas fisik APBD," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kepulauan Selayar, Abdul Wahid kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2024).

Wahid menjelaskan alasan lebih tingginya capaian PAD 2023 ketimbang 2024 pada periode yang sama. Hal itu karena adanya penerimaan PAD yang seharusnya terbayar pada 2022, tetapi menyeberang ke 2023. "Misalnya, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Itu biasanya bergantung ke proyek. Kebetulan dia menyeberang tahun, jadi pajak itu dibayar di awal-awal tahun. Tahun lalu ada yang di tahun sebelumnya belum dibayar, akhirnya terbayarnya nanti di awal tahun. Makanya agak banyak itu," terangnya.

Berdasarkan catatan BPKPD, RSUD KH Hayyung berkontribusi paling besar terhadap capaian PAD. PAD rumah sakit yang kini sudah berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) itu mencapai Rp 5,720 miliar dari target Rp 40 miliar atau 14,30 persen. BPKPD sendiri mencatat realisasi Rp 2,059 miliar dari target Rp 51,855 miliar atau 3,97 persen.

Sementara itu, perangkat daerah lain mencatat realisasi bervariasi. Dinas PUTR menerima Rp 36,692 juta dari target Rp 611,639 juta, Dinas Kesehatan menerima Rp 2,510 juta dari target Rp 17 juta atau 14,76 persen.

Kemudian Dinas Perhubungan Rp 84,579 juta dari target Rp 1,132 miliar atau 7,47 persen, dan Dinas Perikanan Rp 5,2 juta dari target Rp 250 juta atau 2,08 persen.

Selanjutnya Disdagkop UKM menerima Rp 25,753 juta dari target Rp 518 juta atau 4,97 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima Rp 2,727 juta dari Rp 50 juta atau 5,46 persen. Lalu Dinas Lingkungan Hidup menerima Rp76,660 juta dari target Rp 515 juta atau 14,89 persen, serta Dinas Pariwisata menerima Rp 450 ribu dari target Rp 50 juta atau 0,9 persen. Wahid optimistis capaian PAD akan meningkat dan sesuai target sampai akhir tahun nanti. Hal itu, kata dia, akan berbanding lurus dengan serapan APBD dan berjalannya proyek fisik. "Kalau berjalan itu proyek-proyek besar, biasanya PAD bertambah di situ. Kalau berbicara triwulan, mungkin sekitar bulan Mei. Setelah proyek fisik itu kontraknya terbit. Di situ kita akan lihat angka yang signifikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kepulauan Selayar Muhtar mengatakan agar capaian PAD sesuai target, pihaknya melakukan evaluasi tiap triwulan dengan melibatkan perangkat daerah terkait. "Ada rakor tiap triwulan. Untuk mencari tahu sudah sejauh mana yang dicapai, terus apa kendalanya. Dari situ kemudian dirumuskan (langkah selanjutnya),"katanya.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7299004/pemkot-parepare-raup-pad-rp-54-m-rsud-andi-makkasau-penyumbang-terbesar> 18 April 2024.
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7310422/pad-pemkab-selayar-lesu-di-triwulan-i-2024-cuma-rp-8-m-dari-target-rp-95-m> 25 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.